



IKRIMAH VELLA RIYANTI, ANDI SUWIRTA &
MOCH ERYK KAMSORI

Emha Ainun Nadjib: Peran dan Kontribusi Tanpa Penghargaan Politik untuk Bangsa Indonesia, 1991-2013

ABSTRAKSI: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekam jejak seorang tokoh masyarakat yang kritis terhadap kondisi sosial dan terlibat dalam penyelesaian masalah budaya dan politik, yakni Emha Ainun Nadjib. Penelitian ini mengadopsi metode yang sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian sejarah, termasuk langkah heuristik, kritik, interpretatif, dan historiografi. Data yang digunakan berupa buku, artikel jurnal, tesis sarjana, manuskrip, surat kabar, transkrip wawancara, dan berita daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Emha Ainun Nadjib berperan dalam upaya memperbaiki bangsa dengan nasionalisme yang berbasis humanisme. Ia aktif berpidato dari satu kampus ke kampus lain dalam lingkup seni, budaya, sastra, agama, dan politik. Ia juga berpartisipasi dalam pemberhentian Presiden Soeharto pada Mei 1998. Perannya sangat penting dalam perkembangan politik Indonesia, tetapi pada kenyataannya ia tidak terkenal dan diakui secara memadai atas kontribusinya.

KATA KUNCI: Pemerintah Orde Baru; Gerakan Reformasi; Peran Emha Ainun Nadjib.

ABSTRACT: "Emha Ainun Nadjib: His Role and Contribution to the Indonesian Nation Without Political Recognition, 1991-2013". This study aims to analyze the track record of a public figure who was critical of social conditions and involved in resolving cultural and political problems, namely Emha Ainun Nadjib. This study adopted methods in accordance with the principles of historical research, including heuristic, critical, interpretative, and historiographic steps. The data used included books, journal articles, undergraduate theses, manuscripts, newspapers, interview transcripts, and online news. The results show that Emha Ainun Nadjib played a role in efforts to improve the nation with a humanism-based nationalism. He actively delivered speeches from one campus to another on the subjects of art, culture, literature, religion, and politics. He also participated in the overthrow of President Soeharto in May 1998. His role was crucial in the development of Indonesian politics, yet in reality, he was not well-known and adequately recognized for his contributions.

KEY WORD: New Order Government; Reform Movement; Roles of Emha Ainun Nadjib.

About the Authors: Ikrimah Vella Riyanti, S.Pd. adalah Alumni Program Studi Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia), Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia. Dr. Andi Suwirta dan Moch Eryk Kamsori, S.Pd. adalah Pendiri ASPENSI (Asosiasi Sejarawan dan Pendidik Sejarah Internasional) di Bandung, Jawa Barat, Indonesia pada 20 Mei 2006. Alamat emel Penulis: ikrimahvee@gmail.com dan atruwusidna@gmail.com

Suggested Citation: Riyanti, Ikrimah Vella, Andi Suwirta & Moch Eryk Kamsori. (2026). "Emha Ainun Nadjib: Peran dan Kontribusi Tanpa Penghargaan Politik untuk Bangsa Indonesia, 1991-2013" in *INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, Volume 11(2), August, pp.57-84. Bandung, West Java, Indonesia: Minda Masagi Suci Foundation and ASPENSI, with ISSN 2443-1776 (print) and ISSN 2657-0491 (online).

Article Timeline: Accepted (May 20, 2026); Revised (July 17, 2026); and Published (August 17, 2026).

PENDAHULUAN

Setiap yang berkuasa akan mengalami kemunduran, atau bahkan kehancuran. Begitu juga dengan rezim Orde Baru (1968-1998). Seperti yang kita ketahui bahwa selama kurun waktu 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang disertai demonstrasi Mahasiswa dan Rakyat dengan tujuan menuntut diadakannya Reformasi.

M.C. Ricklefs (2009) berpendapat bahwa titik balik porak-poranda benteng terakhir keabsahan rezim Orde Baru, yang menimbulkan kerusuhan massal di berbagai tempat, adalah peristiwa terbunuhnya mahasiswa Trisakti, keruntuhan ekonomi, kebrutalan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), korupsi rezim, dan kemustahilan akan adanya reformasi (Ricklefs, 2009:689).

Hal itu dibenarkan oleh Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto eds. (2008), yang mengatakan bahwa kematian empat mahasiswa Trisakti memicu berbagai gerakan pro-Reformasi untuk menyatukan langkah dan mendesak Presiden Soeharto mengundurkan diri (Poesponegoro & Notosusanto eds., 2008:669). Kegaduhan yang melanda ibu kota Jakarta menandakan bahwa rezim Orde Baru harus dihentikan.

Di tengah kondisi tersebut terdapat beberapa tokoh yang berusaha menetralsir keadaan dengan menjadi penyambung lidah rakyat. Tokoh-tokoh tersebut kemudian diundang oleh Presiden Soeharto untuk duduk bersama di Istana Negara. Satu dari beberapa tokoh tersebut adalah Emha Ainun Nadjib, seorang budayawan yang mendapat penghargaan Satyalancana Kebudayaan pada tahun 2010. Emha Ainun Nadjib juga sebagai tokoh Indonesia yang mendapatkan Anugerah Adam Malik pada tahun 1991 di Bidang Kesusastraan (Nadjib, 2015:9).¹

Empat tahun sebelum peristiwa Reformasi 1998, Emha Ainun Nadjib, beserta dua kawannya yang bernama Umar Kayam dan Ashadi Siregar, memberikan Pernyataan Kebudayaan Akhir Tahun 1994, yang tercatat di dalam surat kabar *Surabaya Post*. Isi dari pernyataan tersebut adalah poin-poin tuntutan kepada pemerintah

¹Lihat juga, misalnya, Berita surat kabar *Jawa Pos* (Surabaya, Jawa Timur: 5 September 1991).

perihal institusi pers. Hal itu menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang berani bersuara di tengah kebijakan *floating mass* atau massa mengambang, yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru.²

Lebih jauh lagi, yaitu pada tahun 1992, ia dikabarkan mendapat pencekalan, seperti yang terdapat dalam Majalah Mingguan *GATRA* (2 Mei 1996), berikut ini:

Emha Ainun Nadjib berkali-kali terkena cekal. Gubernur Jawa Tengah, Ismail, melarang Emha berceramah di wilayahnya pada 1992. Drama Pak Kanjeng disetop pada hari kedua di Yogyakarta, diawal 1994, dan dilarang sama sekali mentas di Surabaya. Lantas Juni 1995, ia gagal berceramah di Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, karena Polisi tak memberi izin. Tiga hari kemudian ia dicekal lagi di Denpasar.³

Selama kurun waktu 1992 hingga 1995, Emha Ainun Nadjib banyak diberitakan perihal pencekalan, namun berbeda dengan pasca peristiwa Reformasi 1998. Ia kini diberitakan sesat dari ajaran Islam oleh situs *online*. Pemberitaan tersebut tentu tidak lepas dari aktivitasnya yang kini dikenal dengan *Maiyah Nusantara*.⁴

Maiyah Nusantara sendiri adalah sebuah forum diskusi yang sangat sederhana, semua ilmu dielaborasi bersama, tidak ada jarak yang begitu jauh antara audiens dengan narasumber, bahkan seringkali podium atau panggung hanya berjarak beberapa centimeter saja dari jamaah (Agustian, 2016).

Peran Emha Ainun Nadjib di dalam aktivitas tersebut adalah menjadi pembicara, sering pula kedatangan tamu khusus yang kemudian dipersilakan menjadi narasumber. Pembahasan di dalamnya tidak lepas dari persoalan kontekstual yang berkaitan dengan kenegaraan, kemanusiaan, dan juga keagamaan.

²Lihat, misalnya, Berita "Emha Ainun Nadjib, Ashadi Siregar, Umar Kayam: Tahun 1994 Proses Pentakberdayaan Potensi Masyarakat Sangat Mencolok" dalam surat kabar *Surabaya Post* (Surabaya, Jawa Timur: Kamis, 17 November 1994, hlm.2).

³Berita "Emha Menggebrak Umat yang Resah" dalam Majalah Mingguan *GATRA* (Jakarta: 2 Maret 1996, hlm.2). Tersedia secara *online* juga di: <https://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/03/03/0019.html> [Diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Oktober 2024].

⁴Lihat, misalnya, Berita "Emha Ainun Nadjib Mengajak Manusia Tidak Sholat?". Tersedia secara *online* di: <https://www.nahimunkar.com/emha-ainun-nadjib-mengajak-manusia-untuk-tidak-shalat/2013> [Diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Oktober 2025].

Penjelasan dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa Emha Ainun Nadjib adalah pribadi yang multi talenta namun unik, karena tidak lepas dari pro dan kontra. Tokoh intelektual yang memiliki pemikiran kritis terhadap perkembangan politik Indonesia serta berperan mengatasi persoalan sosial dan memiliki kemampuan mempengaruhi banyak orang yang dibuktikan dengan banyaknya jamaah di setiap acara *Maiyah Nusantara*. Meski begitu, ia tetap mempertahankan prinsipnya untuk tidak memanfaatkan kesempatan demi mendapatkan jabatan serta kekuasaan dalam bidang pemerintahan.

Ian L. Betts (2006) menilai bahwa sumbangan Emha Ainun Nadjib dalam pemikiran kebudayaan, seni, dan keagamaan tetap tak dikenal dan tak mendapat penghargaan sesuai nilai sejati bagi bangsanya (Betts, 2006). Pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan penulis untuk meneliti mengenai peran Emha Ainun Nadjib dalam perkembangan politik di Indonesia.

Dengan demikian, hal tersebut dapat terjawab dengan tiga rumusan masalah, yaitu: (1) Mengapa Emha Ainun Nadjib dicekal?; (2) Bagaimana peran Emha Ainun Nadjib dalam peristiwa Reformasi di Indonesia pada tahun 1998?; dan (3) Mengapa Emha Ainun Nadjib diberitakan sesat dari ajaran Islam?

Tulisan ini mengkaji dan menganalisis aktivitas Emha Ainun Nadjib dalam kurun waktu 1991-2013. Karena itu, pendekatan yang digunakan adalah interdisipliner dengan menggunakan konsep dari Ilmu Politik dan Sosiologi. Konsep dari Ilmu Politik tersebut ialah *Nasionalisme* dan *Reformasi*. Sedangkan konsep yang diambil dari Sosiologi yaitu *Peran Tokoh* dan *Permasalahan Sosial*. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui dan memahami andil Emha Ainun Nadjib terhadap bangsa dalam cakupan politik di Indonesia (Kartodirdjo, 1992).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Karena itu diperlukan pengamatan kritis yang dilandasi oleh pemahaman,

dengan cara menggali informasi mengenai proses, penerimaan, dan tanggapan terhadap aktivitas Emha Ainun Nadjib, terutama yang berhubungan dengan politik Indonesia. Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi: *heuristik*, kritik, interpretasi, dan historiografi. Data yang digunakan berupa buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, majalah, transkrip naskah, surat kabar, wawancara, dan berita *online* (Sjamsuddin, 2007; Creswell, 2008).

Hal pertama yang penulis lakukan sebelum memulai penelitian yaitu melaksanakan langkah-langkah pendahuluan sesuai dengan penjelasan dari Helius Sjamsuddin (2007), dan sarjana lainnya, yaitu: *pertama*, memilih topik yang sesuai. Setelah mengetahui bahwa di Yogyakarta terdapat Rumah Budaya milik Emha Ainun Nadjib, yang meliputi juga perpustakaan, maka penulis memutuskan untuk menjadikannya sebagai topik penelitian.

Kedua, mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik. Sumber-sumber buku dan karya tulis ilmiah yang penulis dapatkan mengenai Emha Ainun Nadjib dapat membantu membangun paradigma penulis mengenai tokoh ini. Terlebih lagi surat kabar terbitan tahun 1991-2007, yang tersimpan dan terawat dengan baik di Arsip Perpustakaan milik Emha Ainun Nadjib.

Ketiga, membuat catatan penting dan relevan yang berhubungan dengan topik selama penelitian. Pada tahap tersebut, penulis mengumpulkan banyak data yang dapat membantu menjawab rumusan masalah. Seperti mencatat aktivitas Emha Ainun Nadjib yang berhubungan dengan politik Indonesia selama kurun waktu 1991-2013.

Keempat, mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan. *Kelima*, menyusun hasil-hasil penelitian (catatan fakta-fakta) ke dalam suatu pola yang benar dan berarti, yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam hal ini, penulis mengacu pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah dari UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung. *Keenam*, menyajikan dalam cara yang menarik perhatian dan mengkomunikasikannya (Kuntowijoyo, 2003; Sjamsuddin, 2007; Madjid & Wahyudhi, 2014).

Agar tercipta karya tulis ilmiah yang objektif, maka penulis memilih informan penelitian, seperti pihak Manajemen Progress yang menaungi Emha Ainun Nadjib dan *Kiai Kanjeng*. Kemudian beberapa Jamaah *Maiyah Nusantara*, dan pihak yang memberitakan Emha Ainun Nadjib sesat dari ajaran Islam, yaitu dalam website: www.nahimunkar.com

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nama lengkapnya ialah Muhammad Ainun Nadjib. Dulu, pada masa awal kehidupannya, Emha Ainun Nadjib selalu menandatangani karyanya dengan “MH” Ainun Nadjib. Lama-lama ejaannya diubah menjadi “Emha”. Dan jadilah kini nama populernya: Emha Ainun Nadjib. Lahir pada tanggal 27 Mei 1953 di Jombang, Jawa Timur. Anak nomor empat dari lima belas bersaudara.⁵

Emha Ainun Nadjib menjelaskan perihal ayahnya yang bernama Muhammad Abdul Latif; dan ibunya yang bernama Chalimah, sebagai berikut:

Ayah saya adalah petani dan kiai yang mempunyai sebuah surau, tetapi dia adalah pemimpin masyarakat, tempat bertanya dan mengadu orang Desa untuk berbagai masalah yang mereka hadapi. Begitu pula ibu saya. Semua masalah yang tidak dapat mereka pecahkan, mereka ajukan ke orangtua saya untuk dipecahkan.

Bahkan ketika saya masih dalam buaian, dan kemudian menjadi anak kecil, saya seringkali dibawa ibu mengunjungi para tetangga untuk menanyakan apa yang mereka masak, apakah mereka menyekolahkan anak-anak mereka, dan banyak masalah lain.

Pengalaman ini membentuk kesadaran dan sikap sosial saya, dan nilai-nilai kami disadarkan pada agama, karena kunci dalam ajaran Islam adalah menolong sesama manusia dari kemiskinan dan membuat mereka mampu berfungsi sebagai manusia seutuhnya (Betts, 2006:7).

Secara teoritis, keluarga merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi seorang anak. Hal tersebut ditegaskan oleh Doni A. Koesoema (2007) bahwa keluarga merupakan tempat pembentukan karakter anak yang utama, terlebih pada masa-masa

⁵Lihat, misalnya, Berita “Emha Ainun Nadjib: Kiai Bercelana Jin” dalam surat kabar *Kompas* (Jakarta: Rabu, 25 April 1990), hlm.5 dan 6.

awal pertumbuhan sebagai manusia. Tidak hanya itu, keluarga juga merupakan tempat bagi anak-anak untuk menerima pendidikan nilai (Koesoema, 2007:181).

Begitu juga dengan Emha Ainun Nadjib. Ia mengakui bahwa kepedulian terhadap sosialnya terbentuk karena melihat figur ayah dan ibunya. Emha Ainun Nadjib menamatkan pendidikan dasar di SDN (Sekolah Dasar Negeri), yang berlokasi di Desa tetangga. Meskipun ayahnya memimpin berbagai pendidikan yang mengelola TK (Taman Kanak-kanak) sampai SMP (Sekolah Menengah Pertama), ternyata Emha Ainun Nadjib memilih masuk sekolah negeri di Desa tetangga. Alasannya, karena malu jika harus belajar di rumah sendiri (*Ibidem* catatan kaki 5).

Emha Ainun Nadjib melanjutkan pendidikan SMP (Senengah Menengah Pertama) di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Di tahun ketiga belajarnya, ia dikeluarkan dari sekolah tersebut, karena memimpin demonstrasi melawan SATPAM (Satuan Pengamanan) di sekolah tersebut (Betts, 2006:1). Emha Ainun Nadjib, kemudian, menjelaskan hal tersebut, sebagai berikut:

Saya memang tak senang dengan hukuman yang tak wajar. Sendirian, saya tumpahkan perasaan tersebut di papan tulis. Kebetulan papan tulis tadi yang dibawa para santri waktu mereka berdemonstrasi. Langsung saja ketahuan itu tulisan saya, karena para kiai sudah hafal dengan bentuk tulisan Arab saya (*Ibidem* catatan kaki 5).

Akibat dari kejadian tersebut, Emha Ainun Nadjib menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya di SMP (Sekolah Menengah Pertama) Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Lalu melanjutkan di SMA (Sekolah Menengah Atas) Muhammadiyah 1 Yogyakarta hingga selesai (Hadi, 2011:82).

Belum genap satu semester di Fakultas Ekonomi UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta, Emha Ainun Nadjib memutuskan keluar dari bangku perkuliahan, karena musibah yang menimpa keluarganya. Hingga akhirnya, ia bergabung dengan PERSADA (Persatuan Sastrawan Muda) Studi Klub, yang dipimpin

oleh Umbu Landu Paranggi. Emha Ainun Nadjib mengisi kehidupan dunia sastra, diawali di sekitar lingkungan sendiri; diskusi di antara sesama penyair, cerpenis, dan penulis atau wartawan setiap minggu, yang diadakan di kantor surat kabar *Pelopor Yogya*. Sesekali kegiatan tersebut melebar dan menjelajah kampung dan kampus (Nadjib, 1995:xiii).

PERSADA Studi Klub banyak menyumbang terhadap pengembangan Emha Ainun Nadjib secara sosial, intelektual, kultural, dan spiritual. Nama Emha Ainun Nadjib mulai didengar sejalan dengan produktivitas tulisannya yang semakin meningkat dengan sejumlah esai, puisi, dan ceritera-ceritera pendek (Betts, 2006:8).

Jabrohim (2003) menyatakan bahwa paling tidak 6 buah tulisan dalam seminggu lahir dan secara rutin di muat di surat-surat kabar, seperti: *Surabaya Post*; *Jawa Post* (Surabaya); *Berita Nasional*; *Yogya Post* (Yogyakarta); *Suara Merdeka* (Semarang); dan *Suara Karya* (Jakarta). Tulisan-tulisannya yang menggigit dan penuh percik humor banyak dimuat juga di majalah *TEMPO* (Jakarta); surat kabar *Kompas* dan *Suara Pembangunan* (Jakarta); surat kabar *Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta); majalah *Salam*, *Amanah*, *Panji Masyarakat*, *Kiblat*, *Matra* (Jakarta); dan sebagainya. Bentuk penulisannya beraneka ragam, ada puisi, artikel sastra, budaya, cerpen, dan lain-lain. Emha Ainun Nadjib pun banyak menerbitkan naskah drama yang ditulis berdasarkan kondisi sosial dan politik, kemudian ditampilkan dalam bentuk teater (Jabrohim, 2003:29). Lihat gambar 1.

Perihal kondisi politik Indonesia pada masa Orde Baru (1968-1998), dalam kaitannya dengan politik Islam dan konteks peranan Emha Ainun Nadjib, kiranya dapat disederhanakan dalam bentuk bagan 1.

Emha Ainun Nadjib menyusun naskah teatrikal *Lautan Jilbab* dan mementaskannya bersama Kelompok Shalahuddin di Kampus UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta pada tahun 1988. Hal itu dilakukan sebagai bentuk respons terhadap ketidakadilan perihal penggunaan jilbab. Tidak hanya di Yogyakarta, *Lautan Jilbab* pun dipentaskan di beberapa kota besar di Indonesia (Betts, 2006:13).



Gambar 1:

Emha Ainun Nadjib

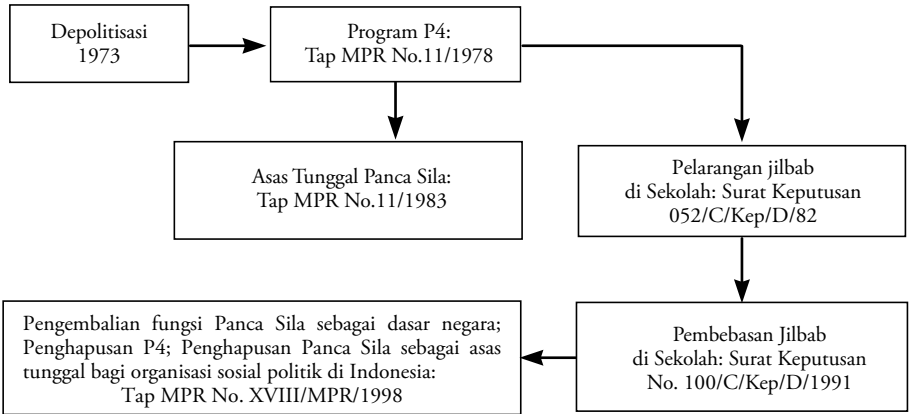
(Sumber: *official instagram of @gamelankiaikanjeng*, 26 November 2016)

Salah satunya di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, pada tahun 1991.⁶

Isi dari naskah *Lautan Jilbab* penuh dengan kritik terhadap rezim Orde Baru mengenai Surat Keputusan 052/C/Kep/D/82 tentang pelarangan berjilbab di sekolah; penetapan Asas Tunggal Panca Sila; dan proses depolitisasi di Indonesia. Pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, muncul perjuangan Muslimah dalam menentang kebijakan pelarangan jilbab di sekolah-sekolah negeri, yang menuntut haknya sesuai Pasal 28 UUD 1945 (Shafiyah & Soeripno, 2003:39).

Muncul pula reaksi dari organisasi-organisasi yang berideologi Islam. Maka dikeluarkanlah Surat Keputusan mengenai pembebasan berjilbab oleh Prof. Dr. Fuad Hasan, melalui surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Republik Indonesia), No.100/C/Kep/D/1991, pada tanggal 16 Februari 1991; dan dengan itu, persoalan jilbab dianggap selesai.

⁶Lihat, misalnya, Berita "Christine Hakim di Lautan Jilbab: Karya Cak Nun Digelar di Go Skate" dalam surat kabar *Jawa Pos* (Surabaya, Jawa Timur: Selasa, 23 Juli 1991), hlm.8.



Bagan 1:
Kondisi Politik di Indonesia, 1973-1998

Pada tahun 1992, Emha Ainun Nadjib mementaskan sebuah karya besar di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Karyanya adalah *Perahu Retak*, sebuah parodi mengenai situasi politik Indonesia saat itu. Dalam pementasan tersebut Emha Ainun Nadjib mengisyaratkan agar orang berani berkata “tidak”. Menolak tiap upaya penindasan, tidak membiarkan diri mereka ditipu, dibuat miskin, peran mereka diperkecil oleh pihak mana pun. Sudah barang tentu kata “tidak” dalam konteks ini ditujukan khusus kepada penguasa atau kepada orang-orang yang dipercaya untuk memegang kekuasaan, yang mempunyai peluang terbesar untuk “mengatur” hidup rakyat, bangsa, dan negara (Betts, 2006:13).

Berikutnya, Emha Ainun Nadjib menulis naskah *Pak Kanjeng* sebagai bentuk respons terhadap permasalahan Kedungombo, salah satu Desa di Jawa Tengah. Menilik pada masa rezim Orde Baru (1968-1998), yang terkenal dengan program “Pembangunan” dan “Tinggal Landas”, karena itu, rezim Orde Baru banyak melakukan pembangunan. Salah satunya adalah membangun waduk di Kedungombo, yang kini menjadi waduk terbesar di Jawa Tengah. Untuk membangun waduk tersebut, diperlukan areal tanah yang luasnya 5.968 hektar. Sedangkan tanah tersebut sudah dihuni oleh sebanyak 5.268 kepala keluarga (Winangun, 2004:46).

Oleh sebab itu perlu ada alternatif agar pembangunan waduk bisa berjalan, tetapi tidak ada pihak yang dirugikan. Karena itu diadakan pembebasan tanah, namun dalam prakteknya menjadi sebuah masalah. Uang ganti rugi yang diberikan kepada rakyat dianggap terlalu rendah, sehingga terjadi penolakan. Alhasil, upaya pembebasan tanah bagi rakyat yang tidak mau menerima ganti rugi dilakukan dengan cara-cara intimidasi dan penangkapan, teror, dan tidak adanya musyawarah (Winangun, 2004:47).

Di tengah kegaduhan yang melanda Kedungombo saat itu, Emha Ainun Nadjib bertemu dengan tokoh yang “ditentukan” oleh masyarakat setempat dan dikenal dengan sebutan *Pak Jenggot*, tetapi kemudian oleh Emha diberi nama *Pak Kanjeng*. Kata “Kanjeng” itu sendiri berasal dari bahasa Jawa, yang biasa digunakan untuk penghormatan.⁷ *Pak Kanjeng* adalah tokoh yang berjuang mempertahankan rumahnya agar tidak digusur, apalagi mengingat uang ganti rugi dari pemerintah yang dianggap terlalu rendah.

Toto Raharjo menjelaskan bahwa muncul gagasan dari dirinya untuk mementaskan naskah *Pak Kanjeng* milik Emha. Karena itu, dalam proses menuju pementasan, Novi Budianto menciptakan kelompok musik untuk mengiringi pementasan tersebut dengan nama *Gamelan Kiai Kanjeng*. Maka bergabunglah antara teater *Pak Kanjeng* dengan *Gamelan Kiai Kanjeng* menjadi *Komunitas Pak Kanjeng*.⁸

Teater tersebut ditayangkan pada tahun 1993 di Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah; ada pula di Surabaya, Jawa Timur, namun dibatalkan. Setelah teater *Pak Kanjeng*, Emha Ainun Nadjib kembali menyelesaikan *Naskah Baginda Faruk* pada tanggal 21 Februari 1994. Naskah tersebut sarat dengan ke-Islam-an dan kritik terhadap penguasa, yang ditampilkan melalui peran Sunan Sableng dengan dialog sebagai berikut:

⁷Wawancara dengan Helmi Mustofa, Manajemen Emha Ainun Nadjib di Yogyakarta, via telepon, pada hari Minggu, 20 September 2015.

⁸Wawancara dengan Toto Rahardjo dan Joko Kamto, personel *Kiai Kanjeng*, di Rumah *Maiyah*, Jalan Barokah No.287, Kadipiro, Bantul, Yogyakarta, pada hari Sabtu, 19 November 2016.

Para penguasa di muka bumi sangat pandai mengatur strategi kapan dan bagaimana mereka memulai berkuasa, namun mereka sangat bodoh untuk menentukan kapan berhenti dari kekuasaannya (Nadjib, 1994).

Kutipan dalam *Naskah Baginda Faruk* karya Emha Ainun Nadjib (1994) tersebut, jelas ditujukan untuk Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia, yang saat itu menjabat selama kurang lebih 27 tahun dari 1967.

Dapat dinyatakan bahwa Emha Ainun Nadjib telah menampilkan empat teater, yaitu: *Lautan Jilbab*, *Perahu Retak*, *Pak Kanjeng*, dan *Baginda Faruk* selama periode 1991-1994. Teater yang ditampilkan tentu menggunakan naskah yang sarat dengan kondisi politik Indonesia, beberapa diantaranya diiringi dengan nafas Islami, juga tidak terlepas dari kehidupan masyarakat lokal. Karena itu, aktivitasnya dapat dikatakan sebagai respons dan/atau kritik terhadap rezim Orde Baru dengan tujuan membukakan mata para penonton agar melek politik.

Ian L. Betts (2006) mengatakan bahwa naskah-naskah yang ditulis oleh Emha Ainun Nadjib menyangkut kehidupan dan relasi antara individu pada berbagai tingkat dan dimensi, juga spiritual dan hubungan dengan Tuhan. Selain aktif menyikapi rezim Orde Baru melalui naskah dan teater, Emha Ainun Nadjib juga aktif mengirimkan tulisannya yang “mencubit pemerintah” ke berbagai surat kabar (Betts, 2006:13).

Melihat aktivitas Emha Ainun Nadjib yang notabene banyak mengkritik pemerintah, terlebih lagi melalui tulisan dan suaranya, pemerintah melakukan pencekalan terhadapnya. Definisi “pencekalan” itu sendiri adalah proses, cara, dan perbuatan mencekal. Sedangkan “mencekal” adalah mencegah dan menangkal, sehingga tidak dapat bepergian. Hal itu terjadi pada tahun 1992, ketika Emha Ainun Nadjib memberikan ceramah di Semarang, Jawa Tengah.⁹

⁹Berita “Siap Pentas di Purna Budaya: Lolos Sensor, Repetoar ‘Pak Kanjeng’ Karya Emha” dalam surat kabar *Bernas* (Yogyakarta: 2 September 1993), hlm.10-11.

Suratkabar *Manunggal* juga menjelaskan perihal pencekalan tersebut bahwa Emha Ainun Nadjib dinilai terlalu berani dalam berbicara, sehingga keberanian tersebut dianggap mengganggu stabilitas Jawa Tengah yang beriklim sejuk dan penuh kekeluargaan. Emha Ainun Nadjib mengkritik Panca Sila, yang menurutnya baru menjadi rumusan hitam di atas putih dan belum menjadi rumusan perilaku keseharian. Bahkan Emha Ainun Nadjib menyentil para pembesar-pembesar yang gemar mencantumkan Panca Sila dalam pidato-pidatonya, namun nol dalam pengamalan Panca Sila-nya.¹⁰

Pihak yang mencekal tidak lain adalah yang berwenang, yaitu Disospol (Dinas Sosial dan Politik) dan KODAM (Komando Daerah Militer) IV Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Dalam berita tersebut juga mengutip kalimat seorang psikolog terkenal dari Semarang bahwa:

Pamor Emha selain pintar *ndagel* juga karena dagelan-dagelannya mewakili realitas masyarakat. Masyarakat merasa terwakili suaranya, rintihannya, jeritannya lewat dagelan-dagelan Emha (*Ibidem* catatan kaki 10).

Suratkabar *Bernas* mencatat bahwa dalam dinamika kesenian di Yogyakarta, karya-karya Emha Ainun Nadjib acapkali mengundang reaksi aparat keamanan yang berbuntut dengan pembatalan maupun pelarangan, baik dalam acara baca puisi, ceramah maupun pementasan drama. Hal itu menimpa pula pada Komunitas *Pak Kanjeng* yang direncanakan tampil di Surabaya setelah sukses tampil di Yogyakarta dan Surakarta.¹¹

Seperti yang dikatakan oleh Toto Raharjo dan kawannya bahwa pementasan Teater *Pak Kanjeng* di Surabaya direncanakan di stadion sepak bola, bahkan sudah dipublikasikan oleh *team* panitia ke Kabupaten-kabupaten yang nantinya akan dihadiri oleh rombongan bus, namun gagal pentas karena pencekalan.¹²

¹⁰Lihat juga, misalnya, Berita "Kecongkakan Sistem" dalam suratkabar *Manunggal* (Yogyakarta: 10 September 1992).

¹¹Lihat Kembali, misalnya, Berita "Siap Pentas di Purna Budaya: Lolos Sensor, Repetoar 'Pak Kanjeng' Karya Emha" dalam suratkabar *Bernas* (Yogyakarta: 2 September 1993), hlm.10-11.

¹²Wawancara dengan Toto Rahardjo dan Joko Kamto, personel *Kiai Kanjeng*, di Rumah *Maiyah*, Jalan Barokah No.287, Kadipiro, Bantul, Yogyakarta, pada hari Sabtu, 19 November 2016.

Dalam konteks ini, Ariel Heryanto (1994) menyatakan bahwa panitia dalam FMTS (Forum Masyarakat Teater Surabaya) meminta izin kepada aparat keamanan untuk menyelenggarakan Teater *Pak Kanjeng*, namun permintaan izin tersebut ditolak. Seperti halnya di Semarang, aparat keamanan menjelaskan kepada pihak pers perihal kekhawatiran akan gangguan stabilitas negara apabila Teater *Pak Kanjeng* diizinkan pentas (Heryanto, 1994:11).

Setelah Komunitas *Pak Kanjeng* memutuskan untuk tidak lagi mementaskan Teater *Pak Kanjeng*, Emha Ainun Nadjib, seorang diri, menerima pencekalan pada tahun 1994. Ia tidak diperbolehkan tampil di UNS (Universitas Negeri Surakarta), Solo, Jawa Tengah. Kronologi pencekalan tersebut terbilang sederhana, seperti yang diberitakan surat kabar *Bernas* di Yogyakarta bahwa Emha Ainun Nadjib sudah hadir dalam acara Diskusi Budaya bertema *Seni dan Kekuasaan: Prospek Kesenian dalam Demokratisasi Sosial* di Fakultas Sastra UNS.¹³

Begitu Emha Ainun Nadjib memasuki ruangan yang penuh penggemarnya itu, spontan semua hadirin bertepuk tangan dan bersorak “*Hidup Cak Nun!*”. Namun suasana menjadi tegang setelah moderator mengumumkan, tanpa menyebut alasan, bahwa Emha Ainun Nadjib tidak jadi tampil sebagai pembicara. Beliau dibawa oleh beberapa Panitia meninggalkan tempat, yaitu diajak makan ke restoran. Hingga akhir acara, Emha Ainun Nadjib tidak lagi muncul (*Ibidem* catatan kaki 13).

Usai acara, Edi Subroto didampingi Ketua Panitia, Drs. Sudarmono, S.U., kepada wartawan mengungkapkan bahwa pembatalan penampilan Emha Ainun Nadjib dilakukan Panitia atas perintah Kansospol (Kantor Sosial dan Politik) Solo bernama Soedjono, yang berdasarkan telepon dari Kaditsospol Jateng (Kepala Direktorat Sosial dan Politik, Jawa Tengah), yaitu Misnadi. Karena itu, Gubernur Jawa Tengah yang bernama Soewardi megemukakan alasan pencekalan terhadap Emha Ainun Nadjib akibat tidak rela

¹³Lihat Berita “Dicekal di UNS, Cak Nun Bicara di UMS: ‘Pencekalan Saya Mencoreng Pangdam’” dalam surat kabar *Bernas* (Yogyakarta: 13 Mei 1994), hlm.11.

apabila hasil-hasil pembangunan dan stabilitas negara yang dibangun dengan susah payah dan telah tertata dengan baik (akan) dirusak. Sehingga sudah pada tempatnya pencekalan tersebut diberlakukan, baik ketika Emha Ainun Nadjib diundang untuk berbicara pada Dialog Budaya Harlah PPP (Hari Lahir Partai Persatuan Pembangunan) ke-21 tanggal 24 April 1994 di Semarang maupun di UNS Solo, Jawa Tengah pada 12 Mei 1994.¹⁴

Dapat dinyatakan bahwa pencekalan yang menimpa Emha Ainun Nadjib tidak lain karena keberaniannya, baik melalui tulisan maupun suaranya dalam mengkritik kondisi sosial yang sedang terjadi, sebagai juga bentuk penyambung suara rakyat. Namun hal tersebut dinilai mengkhawatirkan stabilitas negara, yang sudah dibangun dengan rapih oleh rezim Orde Baru (1968-1998). Hal itu membuktikan bahwa Emha Ainun Nadjib memiliki pengaruh untuk membangun kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa.

Tahun 1998, menjadi masa yang genting bagi Indonesia. Praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) kian santer, ditambah lagi perekonomian negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara mengalami kerusakan berat akibat krisis moneter; dan Indonesia menjadi negara yang menderita kerugian paling parah. Nilai rupiah jatuh sampai 80 persen (Hiariej, 2005:234). Karena itu, timbul krisis ketidakpercayaan rakyat terhadap Presiden Soeharto, sehingga muncul demonstrasi menuntut Reformasi di segala bidang (Suwirta, 2006).

Namun aksi-aksi demonstrasi tersebut diatasi dengan tindakan represif oleh pemerintah Orde Baru. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Umar Syadat Hasibuan (2008) bahwa tindakan represif yang paling fatal terjadi pada 12 Mei 1998, karena empat mahasiswa Trisakti di Jakarta terbunuh dan puluhan lain luka-luka. Situasi tersebut kemudian turut memicu terjadinya berbagai kerusuhan di Jakarta (Hasibuan, 2008:77).

Di tengah kondisi yang kacau-balau tersebut, Emha Ainun Nadjib berkontribusi dalam perjuangan mencapai Reformasi dengan caranya

¹⁴Lihat juga, misalnya, Berita "Kebijakan 'Cekal' Atas Diri Emha" dalam surat kabar *Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta: 19 Mei 1994), hlm.12.

sendiri. Pada 8 Mei 1998, Emha Ainun Nadjib menulis artikel dengan judul “Selebaran Terang Benderang”; “Tentang 11 Mei 1998”; “Dewan Negara”; dan lain-lain. Dalam tulisan-tulisannya itu, ia beranggapan bahwa perlu dibentuk Dewan Negara yang bersifat transisional-temporer sebagai wakil dari penguasa mapan dan wakil inspirator mahasiswa/rakyat. Hal itu dinilai Emha Ainun Nadjib dapat membuat rakyat/mahasiswa lebih percaya kepada wakilnya dibandingkan pada MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), sehingga rakyat/mahasiswa bersedia bersabar oleh otoritas para aspiratornya. Hal itu juga dinilai dapat mengurangi kekhawatiran terhadap perlawanan frontal, karena cepat atau lambat rakyat akan memenangkan kehendaknya dan jika itu terjadi maka tidak harus memperhinakan siapa pun (Nadjib, 2016:15-16).

Pada 11 Mei 1998, bersama *Jamaah Padhang mBulan* di Jombang, Jawa Timur, Emha Ainun Nadjib melakukan *Ikrar Khusnul Khatimah*, yang di dalamnya memuat unsur penyadaran pada masyarakat bahwa suasana perpolitikan Indonesia sedang genting dan berdarah-darah, karena itu dinetralisir dengan *sholat ghoib*, *wirid taubah*, *wirid husnul khatimah*, *ikrar husnul khatimah*, dan *doa husnul khatimah* Bersama (Nadjib, 1999).

Pada 14-15 Mei 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan massal. Pada tanggal 16 Mei 1998, suasana Jakarta semakin mencekam. Toko-toko banyak yang tutup. Sebagian warga masih takut ke luar rumah; dan warga asing saling berbondong-bondong meninggalkan Tanah Air Indonesia (Suparman, 2013:68).

Di sisi lain, Nurcholis Madjid, Utomo Dananjaya, Fahmi Idris, Eky Syahrudin, Emha Ainun Nadjib, dan beberapa orang lainnya melakukan diskusi kecil di Hotel Regent Jakarta dan menghasilkan naskah yang berjudul *Husnul Khatimah*. Isinya adalah saran agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dengan niat, kesadaran, dan konteks *husnul khatimah* – melalui sejumlah alternatif teknis. Pada tanggal 17 Mei 1998, naskah tersebut dikonferensi-perskan di Hotel Wisata, Jakarta. Keesokan harinya, tepatnya pada sore hari, naskah *Khusnul Khatimah* disampaikan kepada Presiden Soeharto

melalui Menteri Sekretaris Negara, yang bernama Saadillah Mursyid (Nadjib, 1999:24-25).

Pada 18 Mei 1998, dua jam setelah Presiden Soeharto membaca naskah *Khusnul Khatimah*, ia menghubungi Nurcholis Madjid. Kemudian Nurcholis Madjid menghubungi Emha Ainun Nadjib (Nadjib, 2016).

Bersamaan dengan itu, pukul 15.20 WIB (Waktu Indonesia Barat), Harmoko, Ketua MPR, terang-terangan meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri demi kepentingan nasional. Hal itu dilakukan dengan suara tegas di Gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), yang dipenuhi ribuan mahasiswa. Harmoko saat itu didampingi seluruh Wakil Ketua DPR, yang disambut dengan gembira oleh mahasiswa (Ricklefs, 2009:691).

Malam harinya, yaitu pukul 23.00 WIB, Menhankam (Menteri Pertahanan dan Keamanan)/Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Jenderal TNI (Tentara Nasional Indonesia) Wiranto, mengumumkan bahwa ABRI menganggap pernyataan Harmoko tersebut merupakan sikap dan pendapat individual, meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif. Mahasiswa menduga penyampaian Wiranto tersebut sebagai pendapat Presiden Soeharto, karena diketahui pada pukul 17.00 WIB Panglima ABRI mengunjungi kediaman Soeharto di Jalan Cendana.¹⁵

Pada 19 Mei 1998, pukul 09.00-11.32 WIB, Presiden Soeharto bertemu dengan penulis naskah *Husnul Khatimah* beserta ulama dan tokoh masyarakat lainnya, yakni: Ketua Umum PB NU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Abdurrahman Wahid; Budayawan, Emha Ainun Nadjib; Direktur Yayasan Paramadina, Nurcholis Madjid; Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia), Ali Yafie; Tokoh Muhammadiyah, Malik Fadjar dan Sumarsono; Tokoh NU, Achmad Bagdja dan Ma'aruf Amin; Tokoh Muslimin Indonesia, K.H. (Kyai Haji) Cholil Baidowi; serta Guru Besar Hukum Tata Negara dari UI

¹⁵Lihat, misalnya, Berita "Cerita di Balik Mundurnya Soeharto" dalam surat kabar *Kompas Online* (Jakarta: 27 Mei 1998). Tersedia secara online juga di: <http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Chronicle/Kompas/May27/cei01.htm> [Diakses di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia: 7 Maret 2017].

(Universitas Indonesia) Jakarta, Yusril Ihza Mahendra (*Ibidem* catatan kaki 15).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Probosutedjo, adik tiri Presiden Soeharto, sebagaimana dikutip oleh Alberthiene Endah (2010), sebagai berikut:

Pada 19 Mei, Mas Harto mengundang sejumlah ulama dan tokoh agama di Istana Negara. Diantara yang hadir adalah Gus Dur, Ali Yafie, Nurcholis Madjid, dan Emha Ainun Nadjib. Agendanya, Mas Harto ingin mendapat masukan perihal kehendak rakyat yang menginginkan dia mundur (Endah, 2010:558).

Fahmi Agustian (2015) juga mencatat bahwa tujuan utama dari pertemuan selama 2,5 jam tersebut adalah merundingkan bagaimana prosedur turunnya Presiden Soeharto, agar prosesnya berjalan secara konstitusional, arif, dan tidak menimbulkan gejolak; dan juga tidak memperparah kondisi sosial masyarakat yang saat itu sedang rentan (Agustian, 2015).

Sepuluh menit sebelum pertemuan tersebut dilakukan, Emha Ainun Nadjib mengatakan bahwa telah terjadi kesepakatan bersama Nurcholis Madjid untuk tidak menjadi anggota Komite Reformasi. Keduanya beranggapan harus berada di luar setiap peluang kekuasaan, sekurang-kurangnya agar rakyat percaya bahwa yang mereka lakukan hanyalah mengusulkan perbaikan keadaan negara, dan bukan mengincar kekuasaan (Nadjib, 1999:28-29).

Dalam pertemuan tersebut Emha Ainun Nadjib berhasil meyakinkan Presiden Soeharto untuk mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa “*ora dadi Presiden ora patheken*” (tidak jadi Presiden tidak masalah). Kalimat tersebut digunakan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 Mei 1998, yang disambut spontan oleh Nurcholis Madjid, “wah, sudah *tuwuk* (kekenyangan) pak?” (Soempeno, 2009:53). Hal itu membuktikan bahwa Emha Ainun Nadjib berhasil mempengaruhi keadaan psikis Presiden Soeharto untuk melepaskan jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dengan cara *husnul khatimah*.

Pada 20 Mei 1998, Ginandjar Kartasasmita memberikan surat kepada Presiden Soeharto, yang berisi pengunduran diri atas 14

Menteri ([Endah, 2010:591](#)). Ketika kabar bahwa kekuasaan akan diserahkan kepada B.J. (Baharuddin Jusuf) Habibie sampai kepada Nurcholis Madjid, ia berucap:

Kekuasaan Habibie harus kita beri isian cek, dia nggak boleh ngisi sendiri seenaknya. Bukan cek kosong! ([Nadjib, 2016](#)).

Kemudian, pukul 23.00 WIB, Emha Ainun Nadjib melalui beberapa sahabatnya menghubungi wartawan, baik lokal maupun asing. Konferensi pers segera dilaksanakan. Nurcholis Madjid membacakan naskah yang disusun dan diketik oleh Emha Ainun Nadjib di sebuah rumah di Jalan Indramayu Nomor 14 Jakarta ([Agustian, 2015](#)).

Pada 21 Mei 1998, berbagai stasiun televisi dipanggil ke istana negara untuk mengabadikan momen pengunduran diri Presiden Soeharto ([Ricklefs, 2009:691](#)). Dalam pidato tersebut ia mengatakan keputusannya mengundurkan diri adalah demi kelancaran proses Reformasi. Ia mendukung Reformasi asal dilaksanakan dengan tertib, damai, dan konstitusional. Sesuai dengan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945, maka dengan sendirinya jabatan pimpinan negara kemudian diserahkan pada wakilnya, yaitu Prof. Dr. Ir. B.J. Habibie ([Endah, 2010:595](#)).

Naskah pidato pengunduran diri Soeharto tersebut disusun oleh Yusril Ihza Mahendra, seorang pakar hukum tata negara, politikus, dan intelektual Indonesia, yang sebelumnya berperan dalam penyusunan naskah *Husnul Khatimah* ([Nadjib, 2016:57](#)).

Setelah pertemuan 2,5 jam di Istana pada tanggal 19 Mei 1998 dan mendampingi Soeharto mengucapkan pernyataan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, Emha Ainun Nadjib jarang menulis dan tampil di media, karena ia kembali melakukan perbaikan bersama masyarakat. Mengenai hal tersebut, [Emha Ainun Nadjib \(2016\)](#) menjelaskan dalam bukunya bahwa ia:

[...] terjun ke bawah dan kembali ke rumah aslinya sebagai rakyat biasa dan melebur dengan masyarakat lainnya untuk membuat Usaha Bersama Ekonomi

agar orang-orang kecil mempunyai ketahanan terhadap mekanisme ketidakadilan struktural.

Beredar dari hari ke hari ke berbagai dusun, kampung, daerah, kota, kampus, masjid, serta segala jenis komunitas (Nadjib, 2016:76-79).

Aktivitas yang dilakukan Emha Ainun Nadjib tersebut kini dikenal dengan nama *Maiyah Nusantara*. Helmi Mustofa, selaku bagian dari Manajemen Progres, menjelaskan bahwa *Maiyah Nusantara* terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) *Maiyah Nusantara* regular yang diselenggarakan oleh pihak Emha Ainun Nadjib dan *Gamelan Kiai Kanjeng* setiap satu bulan sekali di Yogyakarta dengan nama *Mocopat Syafaat*, di Jakarta dengan nama *Kenduri Cinta*, di Surabaya dengan nama *Bangbang Wetan*, di Semarang dengan nama *Gambang Syafaat*, dan di Jombang dengan nama *Padhang mBulan*. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara gratis untuk masyarakat yang hadir; serta (2) *Maiyah Nusantara* yang dilakukan berdasarkan undangan masyarakat dan berbagai pihak.¹⁶

Terlepas dari lingkup Indonesia, Emha Ainun Nadjib dan *Kiai Kanjeng* seringkali mengadakan *Maiyah Nusantara* ke berbagai negara atas dasar undangan, seperti ke: Aberdeen, Abu Dhabi, Australia, Belanda, Finlandia, Hongkong, Inggris, Italia, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Maroko, dan Mesir. Selain untuk memenuhi undangan, Emha Ainun Nadjib dan *Kiai Kanjeng* juga melakukan kegiatan sosial, seperti halnya bertemu dengan para TKW/TKI (Tenaga Kerja Wanita/Tenaga Kerja Indonesia) serta mengenalkan budaya dan alat musik Indonesia (*Ibidem* catatan kaki 16).

Yang mencolok dalam perjalanannya keliling benua tersebut adalah Emha Ainun Nadjib dan *Kiai Kanjeng* memenuhi undangan untuk tampil di gereja. Berkolaborasi secara musikal tanpa melepaskan identitas ke-Islaman-nya, Emha Ainun Nadjib dan *Kiai Kanjeng* tetap menggunakan peci; manakala Novia Kolopaking (istri Emha Ainun Nadjib) tetap mengenakan jilbab. Tidak hanya di beberapa negara, Emha Ainun Nadjib dan *Kiai Kanjeng* pun seringkali melakukan hal

¹⁶Wawancara dengan Helmi Mustofa, Manajemen Emha Ainun Nadjib di Yogyakarta, via telepon, pada hari Minggu, 20 September 2015.

yang sama di Yogyakarta dan Surabaya, Jawa Timur. Namun hal itu dinilai berbeda oleh tokoh Islam di Indonesia. Salah satunya adalah pihak www.nahimunkar.com

Hartono Ahmad Hajaiz, selaku bagian dari pihak pengelola www.nahimunkar.com, menganggap bahwa yang dilakukan oleh Emha Ainun Nadjib secara tersirat adalah membuka pintu untuk Kristenisasi, karena menyalahi fitrah dalam *Al-Qur'an*, surat *Al-Baqarah*, ayat 120. Emha Ainun Nadjib menjadikan ridhonya orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena ibadahnya Islam (*sholawat*) sudah dimodifikasi dengan unsur-unsur Yahudi dan Nasrani. Cara berpikir Emha Ainun Nadjib juga, baik dalam lisan maupun tulisan, tergolong rawan bagi umat Islam karena tidak tertata dengan benar sehingga menjadi samar antara *haq* dan *batil*.¹⁷ Hartono Ahmad Hajaiz kemudian berpendapat, sebagai berikut:

[...] seharusnya seseorang yang setenar Emha bisa membatasi diri di bidangnya. Mulanya Emha adalah penyair dan kolomnis, yang kini dikenal sebagai budayawan. Karena itu apabila berceramah cukup dalam ranah sastra ataupun sejarah dan budaya. Tetapi ketika berbicara agama, kemudian menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan cara memahami agama itu akan menjadi rusak (*Ibidem* catatan kaki 17).

Berbeda dengan pendapat Suyono, seorang wiraswasta berusia 58 tahun, yang sering mengikuti acara Emha Ainun Nadjib di televisi lokal *AdiTV*. Ia menyatakan bahwa:

[...] *Maiyah Nusantara* adalah pengajian yang tradisional, tetapi berintelektual. Sistem pengajian yang mudah dimengerti dan mudah dipahami dari mulai kalangan bawah sampai kalangan atas. Mengalamiahkan agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga bermakna. Tidak juga mutlak dalam kepentingan agama, tapi kepentingan pada umumnya, yaitu memberi contoh, memberikan motivasi, dan pemahaman yang bisa dimengerti oleh semua pihak.¹⁸

¹⁷Wawancara dengan Hartono Ahmad Hajaiz, pihak pengelola www.nahimunkar.com, di kediamannya, Jalan Rawa Jati Timur 001/02 Nomor 23, Kalibata, Jakarta Selatan, pada hari Selasa, 31 Januari 2017.

¹⁸Wawancara dengan Suyono, seorang wiraswasta berusia 58 tahun dan *Jamaah Maiyah*, di kediamannya Jalan Suryopranoto, Kelurahan Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta, pada hari Selasa, 15 November 2016.

Ada pula Winwibisma Putra Anggara, seorang Mahasiswa berusia 22 tahun, yang juga selaku *Jamaah Maiyah*, serta aktif mengikuti kegiatan *Mocopat Syafaat* sejak November 2014. Ia menyatakan sebagai berikut:

[...] *Maiyah Nusantara* adalah acara yang postif sebagai tempat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Melalui acara tersebut juga *Jamaah Maiyah* mendapatkan banyak pelajaran perihal akhlak terhadap orangtua dan sosialisasi dengan masyarakat. Saya menilai bahwa Emha adalah sosok penting yang ada di Indonesia, karena sering kali menjadi penengah di tengah konflik.¹⁹

Berdasarkan perbedaan respons terhadap Emha Ainun Nadjib tersebut dapat dinyatakan bahwa tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan mempengaruhi banyak orang akan mendapati pro dan kontra. Menurut pihak pro, Emha Ainun Nadjib adalah tokoh penting yang berkontribusi dalam menyelesaikan masalah di masyarakat melalui *Maiyah Nusantara*. Emha Ainun Nadjib juga dinilai banyak berbicara mengenai implementasi terhadap ajaran agama Islam dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga pihak pro kini tersebar di berbagai daerah dan aktif terhadap kegiatan *Maiyah Nusantara*.

Sedangkan pihak kontra beranggapan bahwa Emha Ainun Nadjib adalah tokoh yang menyimpang dari ajaran Islam (sesat), karena berani menyatukan antara *sholawat Nabi* dengan lagu Kristiani dalam *Maiyah Nusantara* di Gereja. Hal tersebut membuka pintu untuk usaha Kristenisasi. Emha Ainun Nadjib juga dinilai keluar dari bidangnya, yaitu sastra dan budaya, sehingga sembarangan dalam perkataan maupun tulisan.

Dalam konteks ini, segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pasti menimbulkan respons. Seperti yang dikatakan oleh K. Maryati & J. Suryawati (2001) dan William I. Thomas (2002) dalam Teori Interaksionisme Simbolik bahwa seseorang tidak langsung bereaksi atau memberi tanggapan (respons) terhadap rangsangan dari luar

¹⁹Wawancara dengan Winwibisma Putra Anggara, seorang Mahasiswa berusia 22 tahun, yang juga *Jamaah Maiyah*, via telepon (Bandung-Yogyakarta), pada 22 Februari 2017.

(stimulus), tapi didahului oleh tahap penilaian atau pertimbangan berdasarkan definisi situasi (Maryati & Suryawati, 2001:59; Thomas, 2002).

Menilik rekam jejak Emha Ainun Nadjib dari 1991-1998 yang banyak mengkritik pemerintah, maka pihak responsif saat itu hanya rezim Orde Baru (1968-1998), yang diimplementasikan melalui pencekalan. Hal itu mengalami perubahan pasca peristiwa bersejarah Mei 1998. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa faktor terjadinya respons menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang kemudian diturunkan menjadi respons positif dan respons negatif.

Terlepas dari pro dan kontra, Emha Ainun Nadjib bersama *Kiai Kanjeng* memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan sosial, seperti: (1) Pergolakan antar suku Dayak dan Madura di Kalimantan Barat pada tahun 2001; (2) Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 2006; (3) Konflik Petani Samin di Pati, Jawa Tengah pada tahun 2006; dan (4) Bentrok antar petambak Udang di Tulang Bawang, Lampung pada tahun 2013.

Strategi yang digunakan oleh Emha Ainun Nadjib dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut adalah dengan jalan *rembuk*, yaitu mempertemukan antara pihak yang bermasalah, dan bersama-sama mencari solusi terbaik tanpa ada yang dirugikan. Kemudian *Kiai Kanjeng* memberi hiburan dengan musiknya yang khas. Yang berbeda adalah pada kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, dimana Emha Ainun Nadjib memutuskan untuk mengadakan *Sumpah Lapindo* bagi korban agar mendapatkan ganti rugi dari pihak Perusahaan, tanpa dikurangkan maupun dilebihkan.

Akhirnya, analisis yang dilakukan terhadap peran Emha Ainun Nadjib dalam perkembangan sosial dan politik di Indonesia tidak dimaksudkan untuk melemahkan pihak manapun, namun untuk memperkaya khazanah keilmuan sejarah.

KESIMPULAN

Kondisi politik di Indonesia selalu mengalami perkembangan, terlebih lagi pada tahun 1991 sampai 1998, yang didalamnya terdapat

peristiwa-peristiwa penting, seperti Asas Tunggal Panca Sila, Krisis Moneter, Tragedi Trisakti, hingga Reformasi, yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dalam perkembangan tersebut terdapat salah satu tokoh yang menyumbangkan ide, gagasan, dan karya melalui tulisan dan penampilan teater serta seminar-seminarnya, yakni Emha Ainun Nadjib.

Aktivitas Emha Ainun Nadjib dipandang meresahkan pemerintah, karena yang dilakukan adalah murni mengikuti kondisi sosial dan politik kontemporer, sehingga pemerintah memutuskan untuk mencekalnya. Tidak dapat bepergian dan dilarang pentas di mana-mana. Hal itu dilakukan atas dasar khawatir mengganggu stabilitas negara.

Tidak berhenti sampai di situ. Kontribusi Emha Ainun Nadjib dalam peristiwa Reformasi 1998 pun cukup tersorot banyak mata. Aktivitasnya yang dulu mengkritik pemerintah pada akhirnya duduk bersama di Istana Negara dengan Presiden Soeharto. Mengkritik tetapi berniat menyelamatkan yang dikritik. Dengan alasan agar Presiden Soeharto *lengser* dengan cara terhormat, agar apa yang dirasakan Presiden Soekarno (1945-1968) tidak dirasakan oleh Presiden Soeharto (1968-1998).

Emha Ainun Nadjib tergolong tokoh yang pluralistik. Terlebih lagi *basic*-nya adalah budayawan yang mengenal perihal sejarah serta budaya Indonesia, sehingga senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Tokoh seperti Emha Ainun Nadjib menjunjung tinggi nasionalisme, karena itu rasa toleransi yang dimilikinya dibeda-fahami oleh tokoh Islam yang lainnya.

Aktivitas Emha Ainun Nadjib dalam *Maiyah Nusantara* sebagai pembicara, juga dalam tulisannya di berbagai media massa, keduanya seringkali condong pada pemaknaan dan aplikasi dalam ajaran Islam itu sendiri. Termasuk dalam aktivitasnya bersama umat Kristiani di Gereja. Menjadi hal yang wajar bagi Emha Ainun Nadjib, karena yang menjadi nilai utama adalah rasa toleransi serta kesatuan dan

persatuan sebagai bentuk implementasi terhadap ketakwaan dan keimanan dalam Islam. Ia mengkawinkan ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an. Karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan hanya teori-teori/dalil-dalil Islam, namun aplikasi Islam terhadap masalah-masalah sosial.

Hal itu ditanggapi berbeda oleh pihak yang kontra. Emha Ainun Nadjib dinilai sembarangan dalam berbicara, baik itu secara lisan maupun tulisan. Ranah kemampuan Emha Ainun Nadjib adalah budayawan, seharusnya cukup berbicara dalam lingkup budaya dan sejarah, tidak perlu mencampur-adukkan dengan agama. Terlebih lagi aktivitasnya di Gereja yang harus disadari bahwa itu berarti membuka pintu Kristenisasi. Emha Ainun Nadjib dinilai tidak lagi mengamalkan firman Tuhan. Kedatangan beliau memenuhi undangan Gereja merupakan bentuk bahwa Emha Ainun Nadjib mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Dan hal itu dilarang di dalam kitab suci umat Islam, yakni *Al-Qur'an*.

Perihal pro dan kontra tentu memiliki sudut pandang dan literturnya masing-masing. Terlepas dari itu, pada kenyataannya, peranan Emha Ainun Nadjib tidak ternilai oleh bangsanya. Begitu banyak kontribusi yang ia berikan untuk setiap permasalahan di Indonesia. Dimulai dari rezim Orde Baru (1968-1998) dengan kritiknya terhadap pemerintah dan ajakan kepada masyarakat agar melek politik melalui teater dan tulisan-tulisannya di media massa.

Juga ketika terjadi peristiwa bersejarah, yaitu Reformasi Mei 1998. Hingga masa Reformasi, Emha Ainun Nadjib berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, seperti: Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur; Petani Samin di Pati, Jawa Tengah; Petani Tambak Udang di Tulang Bawang, Lampung; serta Konflik antara Suku Dayak dan Madura di Sambas, Kalimantan Barat. Namun tetap saja, Emha Ainun Nadjib terpinggirkan bersama *wong cilik*.

Perlu digaris-bawahi bahwa sejarah membuktikan adanya satu tokoh yang terlibat dalam perkembangan dan kemajuan perpolitikan Indonesia, namun tidak diangkat dan dikenalkan kepada generasi penerus bangsa, khususnya yang sedang mengenyam pendidikan di

bangku SMA (Sekolah Menengah Atas). Dengan melihat peranan yang diberikan oleh Emha Ainun Nadjib, sudah sepatutnya bagi kita semua untuk menghaturkan terima kasih dengan meneruskan mimpi dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia, yang didasari oleh semangat toleransi dan jiwa nasionalisme.

Referensi

- Agustian, Fahmi. (2015). “Kronik Mei 1998”. Tersedia secara *online* di: <http://www.fahmiagustian.com/kronik-mei-1998-2/> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 14 Maret 2017].
- Agustian, Fahmi. (2016). “Maiyah Sebagai Kata Kerja”. Tersedia secara *online* di: <https://www.caknun.com/2016/maiya-sebagai-kata-kerja/> [Diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 13 Mei 2025].
- Berita “Cerita di Balik Mundurnya Soeharto” dalam surat kabar *Kompas Online* (Jakarta: 27 Mei 1998). Tersedia secara *online* juga di: <http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Chronicle/Kompas/May27/ceri01.htm> [Diakses di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia: 7 Maret 2017].
- Berita “Christine Hakim di Lautan Jilbab: Karya Cak Nun Digelar di Go Skate” dalam surat kabar *Jawa Pos* (Surabaya, Jawa Timur: Selasa, 23 Juli 1991), hlm.8.
- Berita “Dicekal di UNS, Cak Nun Bicara di UMS: ‘Pencekalan Saya Mencoreng Pangdam’” dalam surat kabar *Bernas* (Yogyakarta: 13 Mei 1994), hlm.11.
- Berita “Emha Ainun Nadjib, Ashadi Siregar, Umar Kayam: Tahun 1994 Proses Pentakberdayaan Potensi Masyarakat Sangat Mencolok” dalam surat kabar *Surabaya Post* (Surabaya, Jawa Timur: Kamis, 17 November 1994, hlm.2).
- Berita “Emha Mengebrak Umat yang Resah” dalam Majalah Mingguan *GATRA* (Jakarta: 2 Maret 1996, hlm.2). Tersedia secara *online* juga di: <https://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/03/03/0019.html> [Diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Oktober 2024].
- Berita “Emha Ainun Nadjib Mengajak Manusia Tidak Sholat?”. Tersedia secara *online* di: <https://www.nahimunkar.com/emha-ainun-nadjib-mengajak-manusia-untuk-tidak-shalat/2013> [Diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 17 Oktober 2025].
- Berita “Emha Ainun Nadjib: Kiai Bercelana Jin” dalam surat kabar *Kompas* (Jakarta: Rabu, 25 April 1990, hlm.5 dan 6).
- Berita “Kebijakan ‘Cekal’ Atas Diri Emha” dalam surat kabar *Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta: 19 Mei 1994), hlm.12.
- Berita “Kecongkakan Sistem” dalam surat kabar *Manunggal* (Yogyakarta: 10 September 1992).
- Berita “Siapa Pentas di Purna Budaya: Lolos Sensor, Repetoar ‘Pak Kanjeng’ Karya

- Emha” dalam surat kabar *Bernas* (Yogyakarta: 2 September 1993), hlm.10-11.
- Berita surat kabar *Jawa Pos* (Surabaya, Jawa Timur: 5 September 1991).
- Betts, Ian L. (2006). *Jalan Sunyi Emha*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Creswell, John W. (2008). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Qualitative dan Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Endah, Alberthiene. (2010). *Memoar Romatika Probosutedjo: Saya dan Mas Harto*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Hadi, Sumasno. (2011). “Pemikiran Emha Ainun Nadjib dalam Tinjauan Filsafat Humanisme: Kontribusinya bagi Perkembangan Kehidupan Sosial”. *Tesis Magister Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM [Universitas Gadjah Mada].
- Hasibuan, Muhammad Umar Syadat. (2008). *Revolusi Politik Kaum Muda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Heryanto, Ariel. (1994). “Nasib ‘Pak Kanjeng’, Nasib Kita” dalam Surat kabar *Kompas* (Jakarta: 13 Februari), hlm.11.
- Hiariej, Eric. (2005). *Materialisme-Sejarah Kejatuhan Soeharto*. Yogyakarta: IRE Press.
- Jabrohim. (2003). *Tahajud Cinta Emha Ainun Nadjib*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartodirdjo, A. Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Koesoema, Doni A. (2007). *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, edisi kedua.
- Madjid, M. Dien & Johan Wahyudhi. (2014). *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Maryati, K. & J. Suryawati. (2001). *Sosiologi, Jilid I*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nadjib, Emha Ainun. (1994). *Naskah Baginda Faroq*. Yogyakarta: Perpustakaan Emha Ainun Nadjib.
- Nadjib, Emha Ainun. (1995). *Terus Mencoba Budaya Tanding*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nadjib, Emha Ainun. (1999). *Ikrar Husnul Khatimah*. Jombang: HAMAS Padhang mBulan.
- Nadjib, Emha Ainun. (2015). *Surat Kepada Kanjeng Nabi*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Nadjib, Emha Ainun. (2016). *Saat-saat Terakhir Bersama Soeharto: 2,5 Jam di Istana*. Yogyakarta: Bentang.
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto [eds]. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, edisi revisi.
- Ricklefs, M.C. (2009). *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008*. Jakarta: Serambi, Terjemahan.
- Shafiyah, A. & H. Soeripno. (2003). *Kiprah Politik Muslimah: Konsep dan Implementasinya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soempeno, Femi A. (2009). *Prabowo: Dari Cijantung Bergerak ke Istana*. Yogyakarta: Galangpress.

- Suparman, Djaja. (2013). *Jejak Kudeta (1997-2005): Catatan Harian Letnan Jenderal (Purn) TNI Djaja Suparman*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suwirta, Andi. (2006). "Krisis Moneter, Gejolak Politik, dan Perlunya Reformasi Pendidikan di Indonesia" dalam Abdul Razaq Ahmad & Andi Suwirta. *Sejarah dan Pendidikan Sejarah: Perspektif Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Historia Utama Press.
- Thomas, William I. (2002). "The Definition of the Situation" in in Nathan Rousseau [ed]. *Self, Symbols, and Society: Classic Readings in Social Psychology*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield), pp.103-115.
- Wawancara dengan Hartono Ahmad Hajaiz, pihak pengelola www.nahimunkar.com, di kediamannya, Jalan Rawa Jati Timur 001/02 Nomor 23, Kalibata, Jakarta Selatan, pada hari Selasa, 31 Januari 2017.
- Wawancara dengan Helmi Mustofa, Manajemen Emha Ainun Nadjib di Yogyakarta, via telepon, pada hari Minggu, 20 September 2015.
- Wawancara dengan Suyono, seorang wiraswasta berusia 58 tahun dan *Jamaah Maiyah*, di kediamannya Jalan Suryopranoto, Kelurahan Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta, pada hari Selasa, 15 November 2016.
- Wawancara dengan Toto Rahardjo dan Joko Kamto, personel *Kiai Kanjeng*, di Rumah *Maiyah*, Jalan Barokah No.287, Kadipiro, Bantul, Yogyakarta, pada hari Sabtu, 19 November 2016.
- Wawancara dengan Winwibisma Putra Anggara, seorang Mahasiswa berusia 22 tahun, yang juga *Jamaah Maiyah*, via telepon (Bandung-Yogyakarta), pada 22 Februari 2017.
- Winangun, Y. Wartaya. (2004). *Tanah Sumber Nilai Hidup*. Yogyakarta: Kanisius.